

**PROTOKOL UNTUK MENGUBAH BEBERAPA PERJANJIAN EKONOMI  
ASEAN TERKAIT DENGAN PERDAGANGAN BARANG**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, sebagai Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Negara-Negara Anggota" atau secara sendiri sebagai "Negara Anggota").

**MENGAKUI**, kebutuhan untuk mengubah beberapa perjanjian ekonomi ASEAN terkait dengan perdagangan barang dengan memperhatikan mulai berlakunya Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (selanjutnya disebut sebagai "ATIGA") yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand, yang dimaksudkan untuk mencabut, antara lain, Persetujuan mengenai Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN sebagaimana telah diubah;

**TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:**

**PASAL 1**

Pasal 2 (A)(2) Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura wajib diubah dengan menggantikan Pasal 2 (A)(2) sebagai berikut:

"2. Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) wajib menjadi mekanisme utama untuk AFTA. Untuk produk-produk yang tidak dicakup dalam ATIGA, setiap mekanisme lainnya yang disepakati dapat digunakan."

## PASAL 2

1. Pasal 6(1) Persetujuan Kerangka Kerja e-ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 24 November 2000 di Singapura wajib diubah dengan mengganti Pasal 6 (1) sebagai berikut:

"1. Negara-negara Anggota wajib menyelenggarakan perundingan-perundingan yang diarahkan untuk mempercepat komitmen-komitmen Negara-Negara Anggota terkait dengan produk-produk TIK, layanan TIK dan penanaman modal berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa, dan Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN."

2. Pasal 14 Persetujuan Kerangka Kerja e-ASEAN yang ditandatangani tanggal 24 November 2000 di Singapura wajib diubah dengan mengganti Pasal 14 sebagai berikut:

"Kecuali diatur sebaliknya secara khusus dalam Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bidang Jasa dan Protokol-Protokolnya, dan Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan terkait kebijakan-kebijakan pengamanan, dan pengecualian, wajib tidak berkurang karena, dan wajib berlaku untuk, Persetujuan ini."

## PASAL 3

Pasal 4(1) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos sebagaimana diubah dengan (Perubahan) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, lebih lanjut wajib diubah dengan mengganti Pasal 4(1) sebagai berikut:

“1. Setiap Negara Anggota wajib menghapuskan bea Impor pada produk-produk Sektor Integrasi Prioritas sesuai dengan Pasal 19(2)(a)(i) dan Pasal 19(2)(c) sesuai Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.”

## PASAL 4

Pasal 3 Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Produk-Produk Berbahan Dasar Pertanian yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos wajib tidak berlaku.

## PASAL 5

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Otomotif yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL 6

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk *e-ASEAN* yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL 7

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Elektronik yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL 8

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Perikanan yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL 9

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Kesehatan yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL 10

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Produk-Produk Karet yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL 11

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Tekstil dan Produk Tekstil yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL 12

Pasal 3 dari Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Produk-Produk Kayu yang ditandatangani tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 13

1. Protokol ini wajib mulai berlaku setelah semua Negara Anggota telah menyampaikan piagam-piagam ratifikasi atau penerimaannya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
2. Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resminya kepada setiap Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa penuh kepadanya oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk Mengubah Beberapa Perjanjian Ekonomi ASEAN terkait dengan Perdagangan Barang.

Dibuat di Hanoi, Vietnam, tanggal Delapan Maret Dua RibuTiga Belas, dalam satu salinan asli dalam Bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

ttd.

**LIM JOCK SENG**

Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Kerajaan Kamboja:

ttd.

**CHAM PRASIDH**

Menteri Senior dan Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:

ttd.

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**  
Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

ttd.

**NAM VIYAKETH**  
Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Malaysia:

ttd.

**MUSTAPA MOHAMED**  
Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian

Untuk Pemerintah Uni Myanmar:

ttd.

**DR.KAN ZAW**  
Menteri Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi

Untuk Pemerintah Republik Filipina:

ttd.

**GREGORY L. DOMINGO**  
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Republik Singapura:

ttd.

**LIM HNG KIANG**  
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:

ttd.

**BOONGSONG TERIYAPIROM**  
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam:

ttd.

**VU HUY HOANG**  
Menteri Perindustrian dan Perdagangan



**PROTOCOL  
TO AMEND CERTAIN ASEAN ECONOMIC AGREEMENTS  
RELATED TO TRADE IN GOODS**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (hereinafter collectively referred to as "Member States" or singularly as "Member State");

**RECOGNISING** the need to amend certain ASEAN economic agreements related to trade in goods to take into account the entry into force of the ASEAN Trade in Goods Agreement (hereinafter referred to as "the ATIGA") signed on 26 February 2009 in Cha-am, Thailand, which is intended to supersede, among others, the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area as amended;

**HAVE AGREED AS FOLLOWS:**

**ARTICLE 1**

Article 2(A)(2) of the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed on 28 January 1992 in Singapore shall be amended by substituting Article 2(A)(2) with the following:

"2. The ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) shall be the main mechanism for the AFTA. For



products not covered by the ATIGA, any other agreed mechanism may be used.”

## **ARTICLE 2**

1. Article 6(1) of the e-ASEAN Framework Agreement signed on 24 November 2000 in Singapore shall be amended by substituting Article 6(1) with the following:

“1. Member States shall enter into negotiations which shall be directed towards accelerating commitments of the Member States relating to ICT products, ICT services and investments under the ASEAN Trade in Goods Agreement, the ASEAN Framework Agreement on Services and the ASEAN Comprehensive Investment Agreement.”

2. Article 14 of the e-ASEAN Framework Agreement signed on 24 November 2000 in Singapore shall be amended by substituting Article 14 with the following:

“Except as otherwise provided specifically in this Agreement, the provisions of the ASEAN Trade in Goods Agreement, the ASEAN Framework Agreement on Services and its Protocols, and the ASEAN Comprehensive Investment Agreement, including but not limited to the provisions relating to safeguard measures and exceptions, shall not be prejudiced by, and shall apply to, this Agreement.”

## **ARTICLE 3**

Article 4(1) of ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR, as amended by the ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors

signed on 8 December 2006 in Cebu, the Philippines, shall be further amended by substituting Article 4(1) with the following:

“1. Each Member State shall eliminate import duties on Priority Integration Sectors (PIS) products in accordance with Article 19(2)(a)(i) and Article 19(2)(c) of the ASEAN Trade in Goods Agreement.”

#### **ARTICLE 4**

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Agro-Based Products signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

#### **ARTICLE 5**

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Automotives signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

#### **ARTICLE 6**

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for e-ASEAN signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

#### **ARTICLE 7**

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Electronics signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

**ARTICLE 8**

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Fisheries signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

**ARTICLE 9**

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Healthcare signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

**ARTICLE 10**

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Rubber-Based Products signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

**ARTICLE 11**

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Textiles and Apparel Products signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

**ARTICLE 12**

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Wood-Based Products signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

**ARTICLE 13**

1. This Protocol shall enter into force after all Member States have deposited their instruments of ratification or acceptance with the Secretary-General of ASEAN.

2. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods.

DONE at HA NOI, VIET NAM, this EIGHTH day of MARCH in the year Two Thousand and Thirteen, in a single original copy in the English Language.

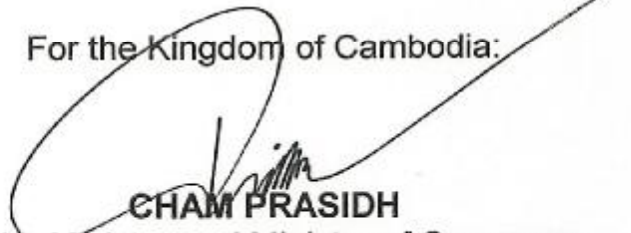
For the Government of Brunei Darussalam:



**LIM JOCK SENG**

Second Minister of Foreign Affairs and Trade

For the Kingdom of Cambodia:

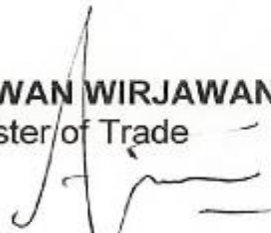


**CHAM PRASIDH**

Senior Minister and Minister of Commerce

For the Government of the Republic of Indonesia:

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**  
Minister of Trade



For the Government of the Lao People's Democratic Republic:



**NAM VIYAKETH**  
Minister of Industry and Commerce

For the Government of Malaysia:




**MUSTAPA MOHAMED**  
Minister of International Trade and Industry

For the Government of the Republic of the Union of Myanmar:



**DR. KAN ZAW**  
Union Minister of Ministry of National Planning and Economic  
Development

For the Government of the Republic of the Philippines:



**GREGORY L. DOMINGO**  
Secretary of Trade and Industry

For the Government of the Republic of Singapore:



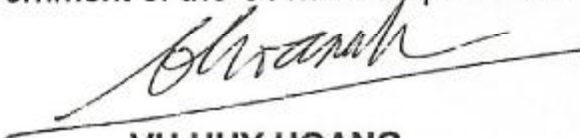
**LIM HNG KIANG**  
Minister for Trade and Industry

For the Government of the Kingdom of Thailand:



**BOONSONG TERIYAPIROM**  
Minister of Commerce

For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam:



**VU HUY HOANG**  
Minister of Industry and Trade